

# **TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**Oleh :**

**Rafi Putra Sahary**

## **Abstrak**

Pengelolaan piutang negara adalah komponen vital dalam administrasi keuangan yang bertujuan untuk memastikan stabilitas arus kas negara. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, piutang negara mencakup semua hak negara dalam penerimaan bukan pajak yang diatur oleh kementerian atau lembaga terkait. Proses pengelolaan piutang harus efektif dan transparan untuk meminimalkan kerugian akibat kelalaian atau tindakan melanggar hukum oleh pegawai negeri atau pejabat publik. Pengelolaan piutang negara dikategorikan dalam empat kelompok: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet, berdasarkan ketepatan waktu pembayaran. Piutang macet adalah piutang yang belum dibayar dalam satu bulan sejak surat panggilan ketiga atau telah ditangani oleh PUPN/DJKN. Proses penyusunan TGR mencakup identifikasi kerugian, pengumpulan data pendukung, dan pencatatan piutang ganti rugi sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) menjadi mekanisme penting untuk memulihkan kerugian negara, baik materiil maupun imateriil, melalui verifikasi dan penilaian yang cermat. Penggunaan aplikasi e-Auditee oleh BPK merupakan inovasi teknologi yang membantu dalam pengelolaan data temuan dan setoran wajib bayar, meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pemantauan. Sistem e-Auditee memungkinkan integrasi data dalam satu platform, memudahkan pemeriksaan awal sebelum pemeriksaan lapangan.

**Kata Kunci:** *Piutang, Tuntutan Ganti Rugi, e- Auditee BPK*

# ***A REVIEW OF THE PREPARATION OF COMPENSATION CLAIMS AT THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY***

***By :***

**Rafi Putra Sahary**

## ***Abstract***

*The management of state receivables is a vital component in financial administration that aims to ensure the stability of the state's cash flow. According to the State Finance Law No. 17 of 2003, state receivables include all state rights in non-tax revenues regulated by relevant ministries or agencies. The receivables management process must be effective and transparent to minimize losses due to negligence or unlawful acts by civil servants or public officials. The management of state receivables is categorized into four groups: current, substandard, doubtful, and bad debt, based on the timeliness of payment. Bad debts are those that have not been paid within one month of the third summons or have been handled by PUPN/DJKN. The process of preparing TGR includes identifying losses, collecting supporting data, and recording compensation receivables in accordance with predetermined decisions. Demand for Compensation (TGR) is an important mechanism to recover state losses, both material and immaterial, through careful verification and assessment. The use of the e-Auditee application by BPK is a technological innovation that assists in managing data on findings and mandatory payments, increasing the efficiency and transparency of the monitoring process. The e-Auditee system allows data integration in one platform, facilitating preliminary checks before field checks.*

***Keyword:*** *Receivables, Indemnity Claims, e- Auditee BPK*